

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Teori*)

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual yang terjadi antara pihak pemberi kuasa (principals) dan pihak penerima kuasa (agents), di mana agents bertindak atas nama principals dalam kapasitas pengambilan keputusan (Polutu et al., 2022). Pada Teori ini menjelaskan situasi agensi sebagai keadaan di mana satu individu atau lebih (prinsipal) mempekerjakan individu lain (agen) untuk memberikan layanan khusus, dan selanjutnya memberikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Prinsipal mengandalkan agen untuk mengelola perusahaan. Namun, seringkali terdapat perbedaan kepentingan yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh manajemen. Dalam teori agensi, dinamika antara masyarakat dan pemerintah dapat diartikan sebagai hubungan agensi, yakni relasi yang timbul dari perjanjian antara individu (sebagai prinsipal) dengan pemerintah (sebagai agen) (Fitrianti & Sari, 2024). Manfaat dari Teori

Keagenan adalah membantu dalam menjalankan mekanisme tata kelola perusahaan sebagai wujud kontrol prinsipal terhadap agen di dalam organisasi (Fernanda & Fadhlia, 2022).

2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah tanggung jawab aparat desa untuk menyampaikan laporan kinerja secara transparan kepada pihak berwenang. Tiap transaksi keuangan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memastikan bahwa proses perencanaan hingga pelaksanaannya berjalan secara efisien, efektif, dan dapat dipercaya (Sarah et al., 2020). Konsep akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa didasarkan pada berbagai regulasi pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang tata kelola keuangan desa. Aturan ini mewajibkan pemerintah desa untuk menggunakan dana desa secara transparan melalui pelaporan keuangan yang terbuka, memberikan pertanggungjawaban yang jelas, serta menerapkan sistem pengawasan yang efektif. Tanggung jawab pengelolaan keuangan desa berada di tangan kepala desa, yang dibantu oleh tim pelaksana (Valentinus et al., 2022).

2.1.3 Transparansi

Transparansi dalam organisasi dapat dimaknai sebagai upaya yang mencakup kepatuhan terhadap aturan hukum, tindakan strategis untuk menjaga kepercayaan publik, serta kerja sama aktif antara manajemen dan pemangku kepentingan untuk menciptakan keterbukaan yang mendukung hubungan yang saling percaya (Fitrianti & Sari, 2024). Ketersediaan informasi yang cukup memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang hanya menguntungkan kelompok tertentu (Anggeli & Andajani, 2023). Transparansi dalam tata kelola dana desa penting untuk menciptakan tata kelola yang akuntabel. Transparansi tidak hanya memastikan pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, mengurangi potensi kecurangan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

2.1.4 Kompetensi Aparatur Desa

Kemampuan aparatur desa mencakup berbagai aspek seperti riwayat pendidikan, pengetahuan dalam bidang akuntansi, pengalaman, serta keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan dana desa (Valentinus et al., 2022). Kompetensi

aparatur desa merupakan sebuah hal yang berkaitan dengan sebuah kemampuan maupun keterampilan yang seseorang miliki dalam bekerja sehingga bisa mencapai sebuah hasil kerja yang maksimal. Kompetensi aparatur desa sangat penting untuk diperhatikan agar pengelolaannya dananya menjadi baik, dan terarah. Melihat hal tersebut aparatur desa memang selayaknya dituntut untuk memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan, serta pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka sehingga berbagai hambatan yang ada dalam proses bekerja dapat teratasi dengan baik. Hal ini adalah salah satu cerminan dari tanggungjawab aparatur desa dalam menjalankan kegiatan pemerintahan (Dewi, 2023).

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal berperan sebagai mekanisme untuk mengatur dan mengawasi kinerja sumber daya manusia, termasuk kepala desa dan perangkat desa, agar dapat bekerja secara efektif dalam mencapai sasaran organisasi. Sistem ini mencakup susunan struktur organisasi, metode, serta standar operasional yang terintegrasi, yang bertujuan untuk melindungi aset organisasi, memastikan keakuratan dan keandalan data akuntansi, serta meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan (Suparman et al., 2024). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,

terdapat 5 (lima) unsur sistem pengendalian internal pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan.

2.1.6 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan salah satu dimensi perilaku yang signifikan dalam menentukan sejauh mana seorang pegawai memiliki keterikatan emosional, afektif, dan rasional terhadap tempatnya bekerja. Komitmen organisasi menjadi aspek perilaku yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur sejauh mana seorang pegawai dalam mempertahankan komitmen dan keterikatannya terhadap suatu lembaga (Ice et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak hanya berkaitan dengan loyalitas individu, tetapi juga mencerminkan hubungan antara pegawai dan organisasi yang bersifat timbal balik. Komitmen organisasi adalah kondisi ketika seorang pegawai menyatakan loyalitas kepada suatu organisasi termasuk visi dan misinya, serta memiliki keinginan untuk terus menjadi bagian dari organisasi tersebut (Simanjuntak et al., 2023).

Komitmen organisasi menggambarkan tingkat keselarasan nilai-nilai personal seorang pegawai dengan nilai-nilai organisasi. Komitmen organisasi sering kali dikaitkan dengan tiga dimensi utama, yaitu komitmen afektif, komitmen kontinuan, dan komitmen normatif. Komitmen afektif merujuk pada keterlibatan

emosional individu terhadap organisasi, yang sering kali tercermin dari rasa bangga dan kepuasan bekerja di dalamnya.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk memperkuat temuan penelitian serta membandingkannya dengan hasil penelitian yang telah ada. Beberapa hasil penelitian yang relevan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Variabel | Persamaan | Perbedaan | Hasil |
|--|---|---|---|---|---|
| Al Edelwis, Syahrani (2024) | Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong | X ₁ : Transparansi Y: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa | Variabel Transparansi | Variabel Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal, Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Tegal | Variabel transparansi memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. |
| Yusranda Saputra, Meita Sekar Sari, Darwin Warisi (2024) | Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar | X ₁ : Transparansi X ₂ : Kompetensi Aparatur Desa Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Variabel Sistem Pengendalian Internal dan Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Tegal | Variabel Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. |

| Nama Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Variabel | Persamaan | Perbedaan | Hasil |
|--|---|---|--|---|---|
| | Kabupaten Lampung Selatan) | | | | |
| Dwi Fitri Puspita, Riky Agung Prasetyo (2020) | Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | X ₁ : Kompetensi Pemerintah Desa X ₂ : Sistem Pengendalian Internal X ₃ : Akuntabilitas Laporan Keuangan Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Transparansi dan Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Tegal | variabel kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas |
| Meliani Fitrianti & Vita Fitriana Sari (2024) | Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance | X ₁ : Transparansi X ₂ : Akuntabilitas Y: Pengelolaan Dana Desa | Transparansi | Variabel Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pengelolaan Dana Desa dan Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Tegal | Variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam pencapaian prinsip good governance. |
| Alexander Valentinus, Nuraini Ismail, Sesilianus Kapa (2021) | Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas | X ₁ : Kompetensi Aparatur X ₂ : Partisipasi Masyarakat X ₃ : Pemanfaatan Teknologi Informasi Y: Akuntabilitas | Kompetensi Aparatur dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Transparansi, Sistem Pengendalian Internal Pemanfaatan Teknologi Informasi | Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas |

| Nama Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Variabel | Persamaan | Perbedaan | Hasil |
|--|---|---|--|--|---|
| | Pengelolaan Dana Desa | Pengelolaan Dana Desa | | | pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| Rahayu Cahyaningrum, Maya Novitasari, Moh. Ubaidillah (2022) | Sistem Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Magetan | X ₁ : Sistem Pengendalian Internal X ₂ : Aksesibilitas Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Z: Komitmen Organisasi | Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi | Aksesibilitas, Kompetensi, Aparatur Desa, Transparansi, dan Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Tegal | Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. |
| Yeni Nurkhasanah, Muzayyidatul Habibah (2023) | Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Komitmen Organisasi | X ₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran X ₂ : Kompetensi Aparat Desa X ₃ : | Kompetensi Aparat Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Komitmen Organisasi, | Kejelasan Sasaran Anggaran, Kepemimpinan, Sistem Pengendalian Internal, | variabel kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa dan |

| Nama Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Variabel | Persamaan | Perbedaan | Hasil |
|----------------------------------|---------------------------------|--|------------------|---|---|
| | sebagai Variabel Moderasi | Kepemimpinan Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Z: Komitmen Organisasi | | Transparansi dan Objek Penelitian yaitu Desa Se- Kabupaten Tegal | kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa dan kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |

2.2 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi dalam pengelolaan dana desa adalah upaya pemerintah desa untuk menyediakan informasi secara terbuka, jelas, dan akurat terkait pengelolaan dana desa (Tasuan & Manane, 2024). Adanya transparansi memperoleh hak dan peluang setara bagi masyarakat dalam mengakses data yang berkaitan dengan tujuan, harapan serta keperluan publik (Putri & Maryono, 2022). Jika dikaitkan dengan keterbukaan, Teori Agensi menekankan bahwa transparansi pemerintah daerah sebagai agen dalam menyajikan informasi terkait pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat sebagai prinsipal akan menghasilkan akses informasi yang menyeluruh, tanpa adanya batasan dalam penyajian maupun isi informasi (Fitrianti & Sari, 2024). Ketika transparansi dijaga dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan Saputra et al. (2024) menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, Fitrianti & Sari, (2024) juga mengonfirmasi hubungan positif dan signifikan antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

dana desa. Lebih lanjut, penelitian oleh Nislandi & Munari, (2023) memperkuat temuan ini dengan menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₁: Transparansi Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.2.2 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi aparatur desa sangat penting untuk pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel. Kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana desa dengan tepat akan meminimalkan pemborosan sumber daya, waktu, dan biaya yang tidak perlu dan meningkatkan kemajuan pembangunan desa. (Adha et al., 2024). Tanpa kompetensi yang memadai, pemerintah desa dapat menghadapi inefisiensi yang merugikan proses pengelolaan dana desa. Dengan adanya komitmen yang tinggi dari kepala desa dan perangkat desa, maka dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa (Aldo et al., 2023). Dalam **Teori Keagenan**, hubungan antara prinsipal (masyarakat desa) dan agen (aparatur desa) berpotensi menimbulkan masalah *agency*, di mana agen lebih cenderung mengejar kepentingannya sendiri. Kompetensi yang tinggi pada

aparatur desa berperan dalam mengurangi masalah ini dengan memastikan bahwa mereka dapat bertindak sesuai dengan tujuan prinsipal, yaitu pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Aparatur yang memiliki tingkat kompetensi tinggi cenderung lebih mampu memenuhi harapan masyarakat dalam hal pengelolaan dana secara bertanggung jawab. Sebaliknya, jika kompetensi aparatur desa rendah, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan dana, kurangnya transparansi, dan peningkatan risiko penyalahgunaan atau ketidaktepatan penggunaan dana desa, yang pada akhirnya menurunkan tingkat akuntabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al. (2024) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian lain oleh Ice et al. (2023) juga menemukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian internal adalah kerangka kerja oleh pemerintah desa untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan baik, terarah, dan terkendali juga memastikan akurasi laporan keuangan, menjaga aset negara dan memastikan semua aktivitas mematuhi peraturan yang berlaku (Adha et al., 2024). Sistem pengendalian internal yang lemah dapat membuka celah bagi kesalahan, kecurangan dan penyalahgunaan dana desa. Tanpa mekanisme pengendalian yang efektif dan pengawasan yang memadai, penyalahgunaan dana desa sulit untuk dideteksi dan dicegah (Suparman et al., 2024). Penerapan sistem pengendalian internal yang baik memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan, baik tingkat daerah maupun pusat (Cahyaningrum et al., 2022). Menurut **Teori Keagenan**, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi masalah *agency* yang dapat muncul antara prinsipal (masyarakat desa) dan agen (aparatur desa). Ketika sistem pengendalian internal berjalan dengan baik, mekanisme ini membantu memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, dalam hal ini pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Sistem pengendalian internal yang kuat

meminimalkan potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Nislandi & Munari, (2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, semakin baik sistem pengendalian internal yang dirancang maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin baik. Berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.2.4 Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi adalah bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi terkait pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara menyeluruh dan terbuka akan tanggung jawab instansi dalam mengelola sumber daya yang diamanahkan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Utami & Haryati, 2023). Dalam Teori Keagenan, transparansi dapat menjadi mekanisme untuk mengurangi ketidaksesuaian dengan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan

prinsipal, mengarah pada pengelolaan dana desa yang akuntabel. Namun, transparansi yang diterapkan tanpa adanya dukungan internal yang kuat pada organisasi (seperti komitmen organisasi) mungkin tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. **Komitmen Organisasi** berperan dalam memperkuat transparansi dengan menciptakan budaya yang mendukung pelaksanaan kebijakan yang terbuka, pelaporan yang jelas, serta pengawasan yang efektif. Dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi dari kepala desa dan perangkat desa, transparansi dalam pengelolaan dana desa akan lebih optimal, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Haryati, (2023) menemukan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya komitmen organisasi yang kuat, transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan, sehingga memberikan dampak positif pada akuntabilitas. Berdasarkan temuan dari penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H4: Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Transparansi dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.2.5 Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi aparatur desa merupakan elemen kunci dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara optimal. Kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional ini mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas (Juhria et al., 2023). Dalam **Teori Keagenan**, hubungan antara prinsipal (masyarakat desa) dan agen (aparatur desa) sering kali menghadapi risiko *moral hazard* dan *adverse selection* akibat asimetri informasi. Perlu adanya komitmen organisasi untuk memastikan bahwa aparatur desa menggunakan kompetensinya dengan maksimal dan bertindak sesuai kepentingan masyarakat. Dengan komitmen organisasi yang tinggi, aparat desa lebih terdorong untuk menggunakan kompetensinya secara optimal, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat.

Penelitian Ice et al. (2023) menunjukkan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tingginya komitmen organisasi mendorong aparat desa untuk menjalankan tugas dengan lebih integritas, sehingga meningkatkan akuntabilitas. Sebaliknya, komitmen yang rendah dapat

mengurangi efektivitas pengelolaan dana desa, meskipun kompetensi aparatur sudah memadai. Dari hasil temuan penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₅: Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

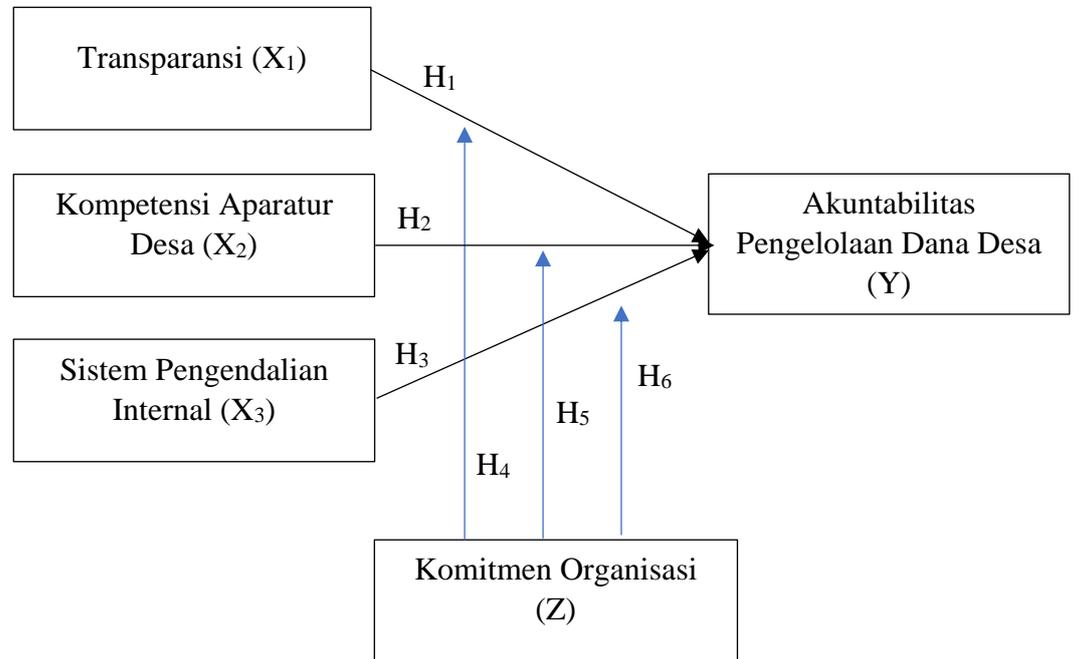
2.2.6 Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen organisasi dapat memaksimalkan sistem pengendalian internal dalam pemerintahan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Cahyaningrum et al., 2022). Menurut teori agensi, hubungan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah desa) mengharuskan adanya mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa agent bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam konteks pengelolaan dana desa, pengawasan tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan sistem pengendalian internal. Namun, agar sistem pengendalian internal dapat berjalan secara efektif, diperlukan komitmen organisasi yang tinggi, yang memastikan implementasi sistem tersebut dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Ketika komitmen organisasi tinggi, perangkat desa cenderung lebih serius dalam menjalankan sistem pengendalian internal dan mematuhi prosedur yang ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.. Penelitian yang dilakukan oleh Satriawan & Dewi, (2020) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mencerminkan pentingnya peran komitmen organisasi dalam memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal untuk mencapai tujuan akuntabilitas yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang dikemukakan adalah:

H₆: Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran